

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	28
1.3 Tujuan Penelitian	29
1.4 Manfaat Penelitian	29
1.5 Orisinalitas Penelitian	31
1.6 Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
2.1 Landasan Teori	34
2.1.1. Teori Kewenangan dalam Negara Hukum	35
2.1.2. Teori Sistem Hukum (<i>Legal System</i>) Lawrence M. Friedman.....	53
2.1.2.1. Subtansi Hukum (<i>Legal Substance</i>).....	53
2.1.2.2. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	56
2.1.2.3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	57
2.2 Landasan Konseptual	58

BAB III METODE PENELITIAN HUKUM 72

3.1 Pengertian Penelitian, Penelitian Hukum dan Metode Penelitian Hukum.72

 3.1.1. Pengertian Penelitian 72

 3.1.2. Penelitian Hukum 73

 3.1.3. Metode Penelitian Hukum 75

3.2 Bentuk dan Pendekatan Penelitian..... 79

3.3 Bahan Hukum..... 87

3.4 Teknik Pengumpulan Data 93

3.5 Jenis Data..... 94

3.6 Pengolahan dan Analisa Data 97

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA 98

4.1. Pengaturan mengenai Eksistensi, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Penyelesain Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa 98

 4.1.1. Eksistensi dan Kedudukan Majelis Penyelesaiaan Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa 98

 4.1.1.1. Dasar Pengaturan Pemilihan Kepala Desa dan Potensi Sengketa 98

 4.1.1.2. Urgensi pembentukan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa..... 104

 4.1.1.3. Kedudukan dan Susunan Organisasi/Kelembagaan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa..... 114

4.1.1.4. Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa	126
4.1.2. Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	128
4.1.2.1. Dasar dan Sumber Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa	128
4.1.2.2. Tugas dan Wewenang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa	144
4.1.2.2.1. Tugas dan Fungsi Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	144
4.1.2.2.2. Wewenang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	148
4.1.3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Perbandingan	150
4.1.3.1. Dasar Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Potensi Sengketa	150
4.1.3.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi	168
4.1.3.3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	187
4.1.3.4. Implikasi Hukum, Sosial dan Politik	189
4.1.4. Kelemahan dalam Pengaturan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa	198

4.1.5. Pengaturan Yang Terkait Dengan Keutuhan Sosial Dalam Pemilihan Kepala Desa	208
4.2. Implementasi Pengaturan mengenai Eksistensi, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa ..	217
4.2.1. Implementasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.	217
4.2.1.1. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Kabupaten Sumbawa Barat	217
4.2.1.2. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat.....	226
4.2.2. Implikasi Putusan yang Bersifat Final dan Mengikat Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	246
4.2.2.1. Implikasi Hukum Putusan Final dan Mengikat Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	246
4.2.2.2. Implikasi Politik Putusan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.	249
4.2.3.2. Implikasi Sosial Putusan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.	250
4.2.3. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lain	252
4.2.3.1. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018.....	252

4.2.3.2. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.....	261
4.2.4. Kajian Yuridis Empiris Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat	267
4.2.5. Pembelajaran Yang Dapat Diperoleh.....	277
4.3. Model Penguatan Eksistensi Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Menjamin Keutuhan Sosial	279
4.3.1. Kebutuhan Penyempurnaan Dasar Pengaturan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	279
4.3.2. Penguatan Kedudukan Kelembagaan dan Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	287
4.3.3. Penyusunan Pedoman Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	289
4.3.3.1. Prosedur Permohonan Sengketa.....	289
4.3.3.2. Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan	292
4.3.3.3. Proses Penanganan dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa	295
4.3.3.4. Pengambilan Putusan dan Penetapan Putusan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	297
4.3.4. Konsep Penguatan Keutuhan Sosial di Dalam Mendukung Keutuhan Sosial di Kabupaten Sumbawa Barat	301

BAB V PENUTUP	313
5.1 Kesimpulan	313
5.2. Saran/Rekomendasi.....	317
DAFTAR PUSTAKA	320

